



## Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai

Utary Ayu Tamara

Universitas Riau, Indonesia

[utary.ayu4032@student.unri.ac.id](mailto:utary.ayu4032@student.unri.ac.id)

Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak

Universitas Riau, Indonesia

[harapan.tua@lecturer.ac.id](mailto:harapan.tua@lecturer.ac.id)

Alamat: Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Panam No.KM. 12.5, Simpang Baru,  
Panam, Kota Pekanbaru, Riau

Korespondensi penulis: [utary.ayu4032@student.unri.ac.id](mailto:utary.ayu4032@student.unri.ac.id)

**Abstract :** *This research aims to provide an overview of the evaluation of the City Without Slums (KOTAKU) program in Sri Meranti Village, Rumbai District, Pekanbaru City. The theory used in this research is Evaluation Theory according to William N Dunn (2003) which consists of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. The research used qualitative research methods, with data collection through observation, documentation and interviews with the Head of KOTAKU Facilitator, Head of LKM, Head of PPM, and the community of Sri Meranti Village. The results of the research show that from the six theoretical contexts of the KOTAKU program evaluation, it has been proven that it has not run optimally in improving the quality of life of the community through improving infrastructure and basic services. There are still obstacles factors found in this program, namely changes in the person in charge of the program, limited human resources (HR), coordination. weak, limited infrastructure and resources, low community participation. In conclusion, the KOTAKU program is an excellent program for improving the quality of the community's living environment, but it is necessary to pay attention to the importance of coordination between related parties, training for human resources as implementers of the KOTAKU program, and increasing community participation related to this program.*

**Keywords:** *Evaluation, Program, Kota Tanpa Kumuh*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Evaluasi menurut William N Dunn (2003) yang terdiri dari Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara bersama Ketua Fasilitator KOTAKU, Ketua LKM, Kasi PPM, dan masyarakat Kelurahan Sri Meranti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam konteks teori Evaluasi program KOTAKU terbukti belum berjalan dengan optimal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan layanan dasar, masih ditemukan faktor kendala dalam program ini yaitu perubahan penanggung jawab program, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), koordinasi yang lemah, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, partisipasi masyarakat yang rendah. Kesimpulannya, program KOTAKU merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat, namun perlu memperhatikan pentingnya koordinasi antarpihak terkait, pelatihan bagi sumber daya manusia sebagai pelaksana program KOTAKU, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan program ini.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Program, Kota Tanpa Kumuh

## **1. LATAR BELAKANG**

Program KOTAKU menekankan pada peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda yang memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antar pihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, terutama masyarakat sebagai subyek pembangunan yang aktif. Kegiatan Program KOTAKU dilakukan oleh tiap-tiap Implementor antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Fasilitator Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Koordinasi perencanaan kegiatan dilakukan oleh LKM didampingi oleh Fasilitator KOTAKU seperti Menyusun dokumen perencanaan teknis dan rencana pemaketan pekerjaan, pembuatan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dan lain sebagainya. Ketika dana masuk untuk melaksanakan kegiatan dilapangan itu bukan LKM yang melaksanakannya tetapi LKM membentuk lagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), KSM ini yang melaksanakan kegiatan infrastruktur, dimana KSM sendiri dibentuk melalui hasil rembukan warga titik lokasi sasaran. Sumber pembiayaan/pendanaan Program KOTAKU berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (Islamic Development Bank-IsDB). Di Provinsi Riau program KOTAKU dilaksanakan oleh lima kabupaten/kota antara lain: Kabupaten Kuansing, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragirih, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Pemukiman kumuh khususnya di Kelurahan Sri Meranti, ada 4 klasifikasi tingkat kumuh yaitu kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan dan tidak kumuh. Sri Meranti secara geografis wilayah berada ditepian atau berbatasan langsung dengan sungai siak dan juga sebagian wilayahnya terletak di jalur lintas yang mengakibatkan Kelurahan Sri Meranti sangat berpotensi mengalami bencana banjir tercatat sudah beberapa kali daerah ini dilanda banjir akibat meluapnya sungai siak, kondisi jalan yang banyak rusak akibat dari banjir, kondisi drainase yang belum sesuai standar, keluhan masyarakat selama ini sebab sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari, banyaknya sampah yang bertumpukan sebagai dampak dari kurangnya tempat-tempat pembuangan sampah,

pengelolaan limbah yang kurang baik, dan kondisi bangunan yang padat dan sempit yang rawan terhadap kebakaran serta susahnya mobil pemadam kebakaran untuk terjun kewilayah tersebut.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a. Program Pembangunan**

Tjokroamidjojo menterjemahkan pembangunan sebagai proses pembaharuan yang kontinyu dan terus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Rogers (1985) bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial alam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk masalah pemerataan, kebebasan, dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

### **b. Definisi Program KOTAKU**

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

### **c. Tujuan Dari Program Kotaku**

- a. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
- b. Menurunnya luas permukiman kumuh.

- c. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) ditingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.
- d. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- e. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Oleh karenanya penjabaran atas tujuan program adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

### **3. METODE PENELITIAN**

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Prastowo (2011:22) Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata kata tertulis atau lisan dari Orang-Orang dan perilaku yang diamati. Pada Penelitian ini, Penelitian Menggunakan Penelitian kualitatif, peneliti berusaha menggali, mengembangkan dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan “Evaluasi Program Kotaku Di Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik agar masalah-masalah yang ada dilingkungan Masyarakat dapat diatasi dengan baik. Dengan demikian efektivitas dari sebuah kebijakan berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan telah tercapai.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh di wilayah perkotaan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Namun, pelaksanaan program ini di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, mengalami berbagai hambatan yang mempengaruhi keberhasilannya. Beberapa faktor penghambat yang dapat diidentifikasi adalah:

**a. Perubahan Penanggung Jawab Program:**

Perubahan penanggung jawab program tanpa adanya serah terima tugas yang formal dan terstruktur menyebabkan data dan informasi terkait program tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam melanjutkan program karena penanggung jawab yang baru tidak memiliki akses penuh terhadap informasi yang diperlukan. Perubahan ini juga mempengaruhi keberlanjutan program KOTAKU, dimana penanggung jawab yang baru harus memulai kembali proses pemahaman dan pelaksanaan program dari awal, menghambat progress yang seharusnya berkelanjutan. Perubahan penanggung jawab program KOTAKU tanpa adanya serah terima tugas yang formal dan terstruktur mengakibatkan data dan informasi tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program karena penanggung jawab yang baru harus memulai dari awal untuk memahami program ini.

**b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):**

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Aparatur kelurahan yang tidak pernah mengikuti pelatihan atau terlibat dalam pelaporan program mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan program, sehingga kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan program secara efektif menjadi masalah utama. Selain itu, aparatur yang tidak memahami betul bagaimana pelaksanaan program ini mengakibatkan evaluasi dan monitoring program tidak berjalan optimal, sehingga permasalahan di lapangan tidak teridentifikasi dan ditangani dengan baik. Kurangnya pelatihan dan partisipasi dari aparatur kelurahan menyebabkan pelaksanaan dan evaluasi program tidak berjalan optimal. Diperlukan lebih banyak program pelatihan yang terfokus dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan program.

**c. Koordinasi yang Lemah:**

Koordinasi yang lemah menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Komunikasi internal yang tidak efektif antara berbagai pihak yang terlibat,

termasuk pemerintah kelurahan, masyarakat, dan pihak swasta, menghambat sinergi dan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyampaian data dan informasi terkait program kepada semua pihak yang berkepentingan menyebabkan miskomunikasi dan ketidakpahaman terhadap kondisi dan kebutuhan di lapangan. Kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat, menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Tantangan ini juga mencakup koordinasi terkait perijinan dan dukungan teknis.

**d. Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya:**

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program KOTAKU. Keterbatasan dana dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program menghambat berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai target program KOTAKU di Kelurahan Sri Meranti. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien juga menjadi faktor penghambat. Selain itu, kurangnya akses dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pelaporan dan monitoring program memperlambat proses pelaksanaan dan evaluasi. Selain itu pendanaan yang sering kali tidak tepat waktu menghambat pelaksanaan proyek di lapangan dan menimbulkan tantangan dalam mengelola kegiatan program.

**e. Partisipasi Masyarakat yang Rendah:**

Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mengurangi efektivitas program KOTAKU, karena masyarakat yang tidak terlibat aktif cenderung kurang peduli dan tidak mendukung penuh upaya pengentasan kawasan kumuh. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya program KOTAKU kepada masyarakat membuat mereka kurang memahami tujuan dan manfaat program, sehingga partisipasi dan dukungan masyarakat menjadi minimal. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan masih belum optimal. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya program ini menjadi salah satu hambatan utama.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

- a. Kesimpulan evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbal menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam mengurangi beberapa kawasan kumuh, meskipun masih ada area yang memerlukan perbaikan lebih

lanjut. Dari segi efisiensi, program berhasil memanfaatkan sumber daya yang ada meskipun terdapat keterbatasan dalam SDM dan infrastruktur, dengan ruang untuk perbaikan dalam alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan proyek. Kecukupan program terlihat dari kemampuannya menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang lebih baik, meskipun masih ada kebutuhan lain seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum yang belum terpenuhi. Pemerataan manfaat program cukup baik, namun beberapa kelompok masyarakat merasa kurang mendapatkan manfaat yang signifikan. Responsivitas program dalam menanggapi kebutuhan masyarakat cukup baik, meskipun terdapat keluhan mengenai lambatnya respons terhadap beberapa isu. Ketepatan program dalam menangani masalah kumuh cukup tepat sasaran, meskipun beberapa aspek memerlukan penyesuaian agar lebih relevan dengan kondisi lokal.

- b. Kendala yang teridentifikasi dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai kriteria evaluasi program. Perubahan penanggung jawab program, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang lemah, keterbatasan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat yang rendah secara langsung mempengaruhi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan program. Misalnya, inkonsistensi dalam perubahan kepemimpinan dapat mengganggu kesinambungan program dan mempengaruhi efektivitas dalam mencapai tujuan mengurangi kawasan kumuh. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat menghambat efisiensi dalam penggunaan anggaran dan waktu, sementara koordinasi yang lemah dapat menurunkan responsivitas terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah juga mempengaruhi pemerataan manfaat program dan ketepatan dalam menanggapi kebutuhan lokal. Dalam konteks KOTAKU, mengatasi kendala-kendala ini menjadi kunci untuk meningkatkan hasil program secara holistik.

### **Saran**

1. Berdasarkan teori Kriteria Evaluasi William N. Dunn (2003), evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menunjukkan bahwa program telah berhasil mengurangi sebagian kawasan kumuh di Kelurahan Sri Meranti, namun perlu meningkatkan efektivitas dalam menjangkau area-area yang masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap alokasi sumber daya manusia dan infrastruktur. Memperbaiki koordinasi antarstakeholder serta mengoptimalkan penggunaan anggaran akan membantu dalam mencapai tujuan program

dengan lebih efisien, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengatasi permasalahan kumuh di wilayah tersebut.

2. Dalam mengatasi kendala-kendala meningkatkan efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), perlu dilakukan dua hal penting. Pertama, menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan pemerataan manfaat dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah kumuh. Kedua, memperkuat koordinasi antarstakeholder dan meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala akan membantu memastikan program berjalan efisien dan responsif terhadap perubahan situasi serta kebutuhan masyarakat di Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pengurangan kawasan kumuh.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arikunto, S. (2021). Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3. Bumi aksara.
- Agustino, Leo. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Ayuningtyas, Dumilah Dr. (2014). Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arief Budiman.(1995). Teori Pembangunan Dunia ketiga, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Arikunto, S. dan C.S.A. Jabar. (2009). Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Bardach, E. (2008). The Implementation Game. Cambridge: MIT Press
- Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo
- Djunaedi, Achmad. 2015. Pengantar Perencanaan Wilayah Dan Kota. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis. routledge.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In Gadjah Mada University Press.
- Dwi C.P. (2019). Urbanisasi dan Permasalahannya. Semarang: Alprin
- Moleong. Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Riyadi, & Deddy. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*.
- Rogers, E. M. (1985). *Komunikasi dan Pembangunan : Perspektif Kritis*. Jakarta : LP3ES.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Teresiana, N. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Indonesia: Graha Ilmu.
- Ufford. Philips Quarles Van. (1988). *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, B., Ismawan, I. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Indonesia: Media Pressindo.
- Akbar, M. F. (2016). *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)*. JAKPP (*Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*), 47-64.
- Afrizal, A. (2018). *Responsivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kota Pekanbaru Tahun 2015*. Jom Fisip.
- Ariana, N., & Karyawan, I. D. M. A. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman Pada Program Kotaku Di Kelurahan Pancor Kabupaten Lombok Timur*. GANEC SWARA. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i2.470>
- Belasari, B., Rahman, B., & Ranto, R. (2022). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020*. *Jurnal Studi Inovasi*. <https://doi.org/10.52000/jsi.v2i2.85>
- Engel. (2014). *Strategi Komunikasi Konsultan Manajemen Wilayah Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota*. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(1), 1–14.
- Fitriarahmi. (2016). *Pengawasan Camat Dalam Penataan Pemukiman Kumuh Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru*. 3(2), 1–12.
- Hadi, A., Bedasari, H., & Ikhsan, M. (2023). *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru*. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 4(1), 43-49.
- Hamid, S. (2023). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Mengurangi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*.

- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.397>
- Harjo, I. W. W., Kusumastuti, A., Rahayu, D. P., & Puspitosari, W. A. (2021). Indeks Keberlanjutan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Malang. *Jurnal Pengembangan Kota*. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.1.50-63>
- Irfani, I., & Winarni, F. (2018). Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(3), 387-397.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Kusumaningtyas, G. M. (2021). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Memperbaiki Drainase di Lingkungan Kota Kebumen. *JPM*.
- Lutfiah, S., & Solahudin, D. (2023). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. <https://doi.org/10.15575/tamkin.v6i3.24233>
- Mentari, E. (2018). Evaluasi Program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Mento, M. E., Zetra, A., & Putri, I. A. (2023). Aktor Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Balai Gadang Kota Padang Tahun 2021. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*. <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i1.18070>
- Nauval Kamil, R., Ningrum, S., & Ahmad Buchori, R. (2021). Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Oleh Satuan Kerja Kota Di Kota Bandung Controlling Of Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Program By City Work Units In Bandung City. Agustus.
- Nurhasanah, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2672>
- Pirziliya, R., & Kadarisman, Y. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Kota Lama Kelurahan Tirtasiak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 498-506.
- Rohimat, D., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU / PNPM DI KECAMATAN CIAWI. *Jurnal Governansi*. <https://doi.org/10.30997/jgs.v3i2.933>
- Rosyanti, E., Retnowati, A., & Habibullah, A. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Tahun 2017–2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.

Rubianti, D. R., Wahyuningrat, & Simin. (2020a). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 33–46.

Rubianti, D. R., Wahyuningrat, & Simin. (2020b). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.

Simarmata, D. S., Tresiana, N., & Hutagalung, S. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i3.104>

Sitorus, H., Astuti, R. S., & Purnaweni, H. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Menanggulangi Kawasan Kumuh di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.1617>

Susanti, E., Anggara, I. P., & Wijaya, W. A. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. *JURNAL DINAMIKA*. <https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i1.1473>

Taqwa, A., & Mashur, D. (2024). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 23-34.

Tiviyanto, D., Irawan, B., & Paselle, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*.

Triastuti, N., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) TAHUN 2021 DI DESA KLITIK KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN. *JI@P*. <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9001>

Utami, A. T., Adiarto, A., & Mayarni, M. (2022). Collaborative Governance Process in Supporting Smart Living in Pekanbaru City. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 14(2), 215-233.

Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2021). Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*.

Wati, M. L., & Bachtiar, Y. (2019). Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Padang. *Journal of Civic Education*. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i3.155>

Wirawan, M. (2015). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Yuliani, S., & Rosyida, G. P. D. (2017). Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa

Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*.

Yunita Syahpriani, O., Ilham, M., & Pemerintahan Dalam Negeri, I. A. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*.

Zubaidah, S., Widianingsih, I., Rusli, B., & Saefullah, A. D. (2023). Policy Network on the Kotaku Program in the Global South: Findings from Palembang, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su15064784>